

**REHABILITASI LAHAN KRITIS SEBAGAI PRAKTIK *DISASTER*
GOVERNANCE BERBASIS KOMUNITAS DI KAWASAN DIENG PLATEAU
KABUPATEN WONOSOBO**

**Siti Mutmainah
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
Email: mutmainahs1997@gmail.com Handphone +6285640441917**

ABSTRAK

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan lindung yang berarti bahwa kelestarian alam di dalamnya harus dijaga demi menjamin penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Tantangan terbesar dalam upaya pemulihan Dieng adalah rehabilitasi lahan kritis di area lahan milik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus yang berlokasi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo mencakup 6 Desa di Kecamatan Kejajar, yaitu Desa Dieng, Sembungan, Buntu, Kreo, Patak Banteng, dan Sigedang serta satu Desa di Kecamatan Garung yaitu Desa Mlandi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah melalui dukungan dari berbagai stakeholders terkait termasuk pihak Swasta, LSM maupun Ngo lainnya. Pendekatan yang dilakukan melalui sistem pertanian berkelanjutan oleh Serikat petani melalui penanaman tanaman keras (*agroforestry*), tanaman konservasi (kopi, carica, terong belanda, dan lain-lain), dan tumpang sari dengan komoditas lain selain kentang. Sedangkan Bhineka Karya melalui pendekatan off farm, yaitu wisata (agrowisata, wisata alam, sejarah dan kebudayaan) dan geopark juga menjadi pendekatan paling logis yang diupayakan. Kedua pendekatan dilakukan atas dasar potensi dan keadaan biogeofisik yang berbeda diantara lokasi penelitian sehingga kegiatan rehabilitasi lahan kritis dapat mencapai keberhasilan. Orientasi ekonomi masyarakat menjadi penentu dari keberlanjutan program dari kedua pendekatan yang dilakukan, hingga saat ini kegiatan wisata masih kalah dengan kegiatan pertanian. Selain itu kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti pendidikan yang rendah dan rasio kepemilikan lahan yang semakin sempit juga masih menjadi penghambat keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan off farm, sehingga pendekatan pertanian berkelanjutan lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan off farm.

Penguatan modal sosial dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui kajian dalam tiga tipologi modal sosial (*Bonding social capital, Bridging social capital dan Linking social capital*) yang dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menunjukkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah melalui dukungan dari para stakeholders terkait telah meningkatkan kapasitas komunitas dalam mengendalikan permasalahan degradasi lahan yang semakin parah. Sehingga peran komunitas, khususnya Bhineka Karya dan Serikat Petani dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah mencerminkan praktik *disaster governance* berbasis masyarakat dalam penanggulangan bencana di kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci : *Disaster Governance* Berbasis Komunitas, Rehabilitasi Lahan Kritis, Kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo.

ABSTRACT

Dieng Plateau Area is a protected area which means that the conservation of nature in it must be maintained to ensure sustainable livelihood (sustainable livelihood). The biggest challenge in Dieng's recovery effort is the rehabilitation of critical land in community-owned land areas. This research uses descriptive qualitative approach method with case study located in Dieng Plateau area of Wonosobo Regency covering 6 Villages in Kejajar Subdistrict, Dieng, Sembungan, Buntu, Kreo, Patak Banteng, and Sigedang Village and one Village in Garung Subdistrict, Mlandi Village . Technique of data collection is done by observation, interview, and documentation.

The results showed that critical land rehabilitation activities were carried out with the cooperation between communities and the government through the support of various related stakeholders including private parties, NGOs and other NGOs. Approaches are made through sustainable farming systems by farmers' Union through agroforestry, conservation plants (coffee, carica, eggplant, etc.), and intercropping with other commodities other than potatoes. While Bhineka Karya through off farm approach, that is tourism (agro tourism, nature tourism, history and culture) and geopark also become the most logical approach that strived. Both approaches are based on different biogeophysical potentials and conditions among the research sites so that critical land rehabilitation activities can be successful. The economic orientation of the community becomes the determinant of the sustainability of the programs of both approaches, to the extent that tourism activities are still inferior to agricultural activities. In addition, the socio-economic conditions of the community, such as low education and the increasingly narrow land ownership ratio, are also a hindrance to the success of critical land rehabilitation with off farm approach, so that sustainable agriculture approach is superior to off farm approach.

Strengthening social capital in critical land rehabilitation activities through studies in three typologies of social capital (Bonding social capital, Bridging social capital and Linking social capital) viewed from social, economic, and cultural aspects of society shows that cooperation between communities and government through the support of the related stakeholders have increased the capacity of the community in controlling the problems of increasingly severe land degradation. So the role of the community, especially Bhineka Karya and Serikat Petani in critical land rehabilitation activities has reflected the community-based disaster governance practice in disaster management in Dieng Plateau district of Wonosobo regency.

Keywords: Community Based Disaster Governance, Critical Land Rehabilitation, Dieng Plateau Area Wonosobo.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan lindung yang berarti bahwa kelestarian alam di dalamnya harus dijaga demi menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat dan juga masyarakat di wilayah sekitarnya. Permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemulihan Dieng sebagai kawasan lindung adalah rehabilitasi lahan kritis di area lahan milik masyarakat. Meluasnya degradasi lahan terjadi karena kegiatan budidaya kentang, dampaknya pada musim hujan terjadi tanah longsor di banyak titik pemukiman dan ruas jalan sepanjang kecamatan Garung-Kejajar, banjir yang terjadi karena terganggunya DAS oleh timbunan longsor, serta kekeringan pada saat musim kemarau.

Dampak dari kerusakan hutan dan lahan yang terjadi menjadikan Kawasan Dataran Tinggi Dieng menyimpan banyak potensi bencana. Ancaman bencana yang ada memunculkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan terjadinya bencana. Kesadaran dan kepedulian tersebut terceminkan dari terbentuknya beberapa komunitas peduli lingkungan di Kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo, diantaranya adalah Bhineka Karya dan Serikat Petani. Basis kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan oleh Bhineka Karya adalah dengan upaya-upaya *off farm*, sedangkan Serikat Petani terfokus pada kegiatan yang berbasis konservasi lahan.

Nakagawa dan Shaw (2004) mengatakan bahwa masyarakat dengan modal sosial dan tradisi kegiatan masyarakat dapat berpartisipasi secara proaktif dalam program rehabilitasi serta meningkatkan tindakan kolektif masyarakat.¹ Bentuk dari partisipasi aktif komunitas masyarakat ini merupakan perwujudan dari praktik *disaster governance* berbasis masyarakat, dimana modal sosial merupakan dasar dari terjadinya interaksi dan hubungan sosial dalam suatu komunitas, modal sosial juga merupakan faktor terpenting dalam penguatan kapasitas komunitas bencana dalam *disaster governance*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik *disaster governance* berbasis masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui penguatan modal sosial yang mendasari interaksi dan hubungan sosial komunitas masyarakat di Kawasan Dataran Tinggi Dieng khususnya di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

¹ Nakagawa & Shaw, *Social Capital: A Missing Link to Disaster Recovery*, *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* March 2004, Vol. 22, No. 1, pp. 5–34

B. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan pola pengelolaan lahan milik masyarakat sebelum dan sesudah diterapkannya program rehabilitasi lahan kritis.
2. Menjelaskan bagaimana kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan oleh Bhineka Karya dan Serikat Petani.

C. Tinjauan Pustaka

1. *Disaster Governance*

1.1 *Definisi disaster governance*

Disaster governance kadang juga disebut sebagai pemerintahan adaptif (bencana) atau tata kelola risiko bencana digabungkan sebagai tema yang berkaitan dengan pengelolaan masalah sosial-lingkungan yang kompleks dan risiko terkait. Ini terletak dalam konteks yang lebih luas dari tata kelola risiko (Renn 2008) mempertimbangkan semua jenis risiko, bukan hanya bencana. Ini juga termasuk lembaga, organisasi, hukum, peraturan dan kontribusi dari masyarakat sipil dan pelaku sektor swasta yang mempengaruhi manajemen risiko (Brunner et al. 2005; Holley et al. 2011). Pemerintahan bencana sering dicirikan sebagai sistem manajemen risiko, yang bersifat kolaboratif, multi-partai, dan multi-level. Tata kelola risiko dipandang sebagai pendekatan yang lebih inovatif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menangani masalah lingkungan yang kompleks karena orientasinya yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pembelajaran untuk pemecahan masalah (Holley et al. 2011).² Ada tiga prinsip tata kelola paling pokok dalam inter-relasi para pihak dimaksud, yakni: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.³

1.2 *Disaster Governance Berbasis Komunitas*

Komunitas yang memiliki kapasitas untuk *governance* maka ia harus mempunyai sejumlah kriteria tersebut. Sudarmo (2008) memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan kriteria komunitas, yaitu ; (1) kemampuan untuk mengorganisasi dirinya secara informal, (2) kemauan belajar dari pengalaman sebelumnya dan hal-hal yang belum diketahui untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang, (3) bekerja dalam waktu yang jelas dan nyata melalui *network*, (4)

² Gall, M, dkk, *Governance in Disaster Risk Management*, Integrated Research On Disaster Risk, Juli 2014.

³ Erwin dan Edi Indrizal, *Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasi dan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar)*, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang, 2014.

kesediaan berbagi peran diantara keanekaragaman pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia lainnya yang tersedia, dan (5) terselenggaranya distribusi intelegensia untuk memecahkan masalah bersama, dan ini berarti menuntut kesediaan berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas satu sama lain, dan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang tidak menentu dan kompleks. *Disaster governance* berbasis komunitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari tata kelola bencana dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan tindakan kolektif mengatasnamakan sebuah komunitas kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana.⁴

1.3 Modal Sosial dalam *Disaster Governance* Berbasis Komunitas

Modal sosial merupakan dasar interaksi dan aktivitas sosial dari sebuah komunitas masyarakat dalam *disaster governance* berbasis komunitas. Hal ini menyangkut nilai-nilai kepercayaan (*trust*), kerjasama (*network*) dan norma (*norms*) yang menjadi dasar relasi antara masyarakat secara informal serta berkembang didalam komunitas masyarakat seiring dengan interaksi sosial yang dilakukannya. Modal sosial memiliki beberapa elemen yang merupakan sumber dan energi bagi warga dalam suatu komunitas. Kekuatan modal sosial dapat diketahui melalui elemen-elemen yang terlekat dalam struktur sosial komunitas. Kekuatan modal sosial inilah yang akan memunculkan suatu tindakan kolektif dari masyarakat di kawasan rawan bencana untuk berpartisipasi aktif dalam tindakan pencegahan dalam ruang lingkup *disaster governance*. Dalam melihat praktik *disaster governance* berbasis masyarakat, peneliti akan menggambarkannya dalam tiga tipologi modal sosial, yaitu : modal sosial *bonding* (ikatan), *bridging* (menjembatani) dan *linking* (menghubungkan).

2. Rehabilitasi Lahan Kritis

2.1 Definisi Rehabilitasi Lahan Kritis

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-Ii/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2012, definisi dari Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.⁵

⁴ Andy Arya Maulana Wijaya, *Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah ISSN : 2503-4685 Vol. 1 No. 1 April 2016.

⁵ *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.14/Menhut-Ii/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2012*, hal. 6.

2.2 Rehabilitasi Lahan Kritis Sebagai Praktik *Community Governance*

Community governance mengacu pada "pengelolaan tingkat masyarakat dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh, dengan, atau atas nama sebuah komunitas, oleh sekelompok pemangku kepentingan masyarakat". Fokus pada 'komunitas' dan bukan pada perusahaan, organisasi, pemerintah daerah atau sektor publik adalah ciri khas tata pemerintahan kemasyarakatan terhadap bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Keterlibatan masyarakat tertanam dalam "pemerintahan masyarakat" karena yang terakhir menangani pengelolaan dan pengambilan keputusan adalah masyarakat (Totikidis dkk, 2005).⁶

Dalam hal ini upaya penanggulangan bencana tersebut adalah dengan kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang memunculkan komunitas-komunitas dari masyarakat di daerah rawan bencana dengan cara yang berbeda dalam proses kegiatannya. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis didasarkan pada hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk dari *community governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif deskriptif adalah mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Penelitian mencakup beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung berdasarkan pada potensi ketersediaan data. Peneliti memilih 5 Desa yang ada di Kecamatan Kejajar, yaitu Desa Sembungan, Buntu, Kreo, Patak Banteng dan Sigedang serta satu Desa di Kecamatan Garung yaitu Desa Mlandi.

⁶ Totikidis V1, Armstrong A F & Francis R D. *The Concept of Community Governance: A Preliminary Review*. Centre for International Corporate Governance Research, Faculty of Business and Law, Victoria University, PO Box 14428, Melbourne, VIC 8001, Australia. Refereed paper presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November, 2005

Informan penelitian terdiri informan kunci dan Informan Triangulasi, pemilihan informan didasarkan pada keterlibatannya dalam Program Pemulihan Dieng. Penarikan sampel dengan teknik Bola Salju atau *Snowball Sampling*.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dari sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan Interpretasi Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan penelitian dilakukan melalui triangulasi data, pengamat, teori, dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Di Kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo

Aspek sosial, ekonomi, dan budaya berperan penting dalam kajian modal sosial yang ada didalam masyarakat. Modal sosial inilah yang berperan penting dalam penguatan kapasitas sebuah komunitas untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dalam menjelaskan bagaimana peran dan bekerjanya modal sosial terkait dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dapat digambarkan melalui tiga tipologi modal sosial yaitu, (1) modal sosial *Bonding*, (2) modal sosial *Bridging*, dan (3) modal sosial *Linking*. Selain itu, tiga tipologi modal sosial tersebut juga dapat digunakan sebagai parameter dalam mengukur modal sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun beberapa unsur dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat diantaranya adalah agama atau kepercayaan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan, serta budaya dan tradisi.

Berdasarkan aspek sosial ekonomi masyarakat dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu, (1) walaupun kawasan berada pada ketinggian > 1300 m dpl dengan kelerengan lahan yang tinggi, tekanan masyarakat pada lahan untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian tadah hujan masih sangat tinggi karena masyarakat srtes secara sosial-ekonomi, selain itu terbatasnya pilihan budidaya pertanian yang terfokus pada tanaman holtikultura lahan kering juga memperlihatkan tingkat stress masyarakat yang tinggi secara sosial-ekonomi (2) matapencaharian berbasis lahan dengan memanfaatkan lahan untuk budidaya tanaman holtikultura berupa kentang dan wortel sangat dominan, (3) kepadatan penduduk yang relatif

masih tinggi, tingkat pendidikan dan skill yang rendah menjadikan terbatasnya pilihan untuk mengatasi stress masyarakat untuk masuk dalam persaingan mendapatkan lapangan kerja.

Sedangkan kajian dalam karakteristik sosial-budaya masyarakat menunjukkan bahwa budidaya kentang merupakan sebuah tradisi, yang terbingkai dalam istilah “*Pejah Gesang Ndherek Kentang*” sehingga masyarakat sulit untuk mengganti dengan komoditas lain selain tanaman kentang, karena bagi mereka tetap mempertahankan kegiatan budidaya kentang adalah suatu tradisi walaupun pada dasarnya masyarakat telah menyadari bahwa kegiatan budidaya kentang menimbulkan berbagai masalah lingkungan yaitu degradasi lahan sehingga mempengaruhi produksi kentang yang sudah tidak lagi menjanjikan seperti dahulu.

2. Ancaman Bencana Dari Paradigma “ *Pejah Gesang Ndherek Kentang* “ Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian

Paradigma “*Pejah Gesang Ndherek Kentang* “ dalam masyarakat Dieng merupakan suatu fenomena sosial dalam masyarakat di kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu faktor penghambat dari keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Dalam menjelaskan fenomena sosial tersebut peneliti menyajikan data tentang pemetaan lahan kritis di Kecamatan Kejajar, Sistem Pertanian, dan juga ancaman bencana. Secara geologis dan geografis, dataran tinggi Dieng adalah kompleks gunung api aktif yang padat penduduk. Meskipun ancaman bencana berupa gas beracun setiap saat bisa datang dari 11 kawah yang ada di sana, akan tetapi tanah-tanah vulkanik subur yang dihasilkan oleh kompleks gunung api ini telah menjadi daya tarik tersendiri. Komoditas kentang menjadi pemikat utama bagi petani Dieng karena tanah dan udaranya cocok serta keuntungannya sangat menggiurkan. Maka orangpun seperti melupakan ancaman bencana yang setiap saat bisa datang dan menelan korban jiwa.

Kegiatan budidaya kentang menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya lahan kritis. Berdasarkan data tabel kelas kerusakan lahan di kawasan lahan milik yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo, jumlah total kerusakan lahan di Kecamatan Kejajar telah mencapai 4209,16 ha sedangkan di Kecamatan Garung totalnya adalah 525,24 ha. Beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kejajar menduduki posisi pertama dengan kerusakan lahan terluas yaitu di Desa Sikunang yang mencapai 601,33 ha dan terendah di Desa Campursari dengan total 63,29 ha. Kelas kerusakan lahan milik di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo didasarkan pada kelas kerusakan (1:sangat ringan; 2:ringan; 3:sedang;

4:berat; dan 5:sangat berat) serta tingkat kelerengan lahan (A : Lereng 0 – 15%; B : Lereng 15 – 25%; C : Lereng 25 – 40%; dan D : Lereng > 40%.

Lahan di kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo sebagian besar merupakan lahan hak milik masyarakat, dimana 60% lahan yang ada merupakan milik masyarakat dan 40% lainnya merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menjadikan pentingnya rehabilitasi lahan kritis pada area lahan milik masyarakat. Lahan yang makin kritis menyebabkan biaya produksi semakin meningkat akan tetapi produktivitas lahan menurun, sehingga menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan. Dengan penghematan di sana-sini, petani kentang di Dieng mencoba bertahan. Keengganan petani beralih dari budidaya kentang juga disebabkan ketidakbebasan yang diakibatkan oleh antara lain:

- 1) Telah terikatnya petani dengan pedagang pupuk dan pestisida.

Banyak petani kentang yang mendapatkan pupuk dan pestisida dari pedagang dalam bentuk hutang. Hutang ini dikembalikan pada saat panen kentang. Untuk memulai budidaya tanaman kentang pada musim tanam selanjutnya, petani kembali berhutang.

- 2) Telah terikat hutang dengan lembaga keuangan.

Biaya produksi kentang yang tinggi menyebabkan modal usaha yang dikeluarkan diperoleh dari lembaga keuangan tertentu baik formal maupun non formal. Besarnya pinjaman yang juga berarti tingginya nilai angsuran yang harus dibayar hanya dimungkinkan bisa dipenuhi dengan budidaya kentang. Lembaga keuangan pun hanya bersedia mengeluarkan dananya apabila dipergunakan untuk budidaya kentang. Pihak Bappeda Wonosobo mengklaim bahwa jumlah hutang rata-rata per-KK adalah senilai Rp. 100.000.000,-.

- 3) Keinginan petani mempertahankan *cash flow*.

Seperti disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa lembaga keuangan hanya bersedia menanamkan modalnya kepada petani yang melakukan budidaya kentang. Dan, sesuatu yang salah kaprah pun terjadi dimana hutang dianggap sebagai dana segar (*fresh money*) yang menopang perekonomian atau *cash flow* rumah tangga. Fenomena yang tentu saja membahayakan dan pasti-lah kebangkrutan sebagai *ending*-nya.

- 4) Tidak ada/minimnya alternatif pilihan yang tersedia.

Sampai saat ini, belum ada pilihan tanaman komersial alternatif yang cocok untuk Kawasan Dieng dan mampu menghasilkan keuntungan yang setara dengan kentang. Minimnya alternatif ini bukan hanya berkaitan dengan besar/jumlah keuntungan yang dapat dijanjikan produk kentang, namun juga dari segi kecepatan atau waktu yang dibutuhkan

untuk mendapatkan hasil/keuntungan tersebut. Kedua hal tersebut besar keuntungan dan waktu budidaya memiliki sangkut-paut dengan hutang petani pada pedagang pupuk/pestisida dan lembaga keuangan.

5) Faktor sosial-budaya dan nostalgia masa lalu.

Kentang telah dibudidayakan di Kawasan Dieng sejak tahun 1980-an. Masyarakat telah menganggap pertanian kentang sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan setempat. Petani akan merasa canggung atau seolah kehilangan sesuatu apabila tidak membudidayakan kentang di lahan pertaniannya. Selain itu, muncul stigma bahwa masyarakat/petani yang telah tidak menanam kentang berarti telah bangkrut atau terpuruk kondisi perekonomian rumah tangganya. Meskipun menyesatkan, stigma ini cukup efektif sebagai ‘hantu pemaksa’ untuk terus berbudidaya kentang. Keberlanjutan budidaya kentang juga dipergunakan petani/masyarakat untuk ber-nostalgia dengan masa lalu yang sukses. Nostalgia ini tentu saja diimbangi dengan harapan akan berulangnya zaman keemasan tersebut.

3. *Disaster Governance* Berbasis Komunitas Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis

Berdasarkan kajian mengenai potensi sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat di kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo, maka praktik *disaster governance* berbasis komunitas yaitu Bhineka Karya dan Serikat Petani dapat dilihat melalui inisiatif komunitas Bhineka Karya dan Serikat Petani, modal sosial dalam *disaster governance* berbasis komunitas, tipologi modal sosial dalam rehabilitasi lahan kritis, dan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai antithesis ketergantungan petani pada pasar.

Serikat Petani melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis dengan prinsip konservasi lahan berbasis ekonomi masyarakat. Salah satu contoh program yang sedang dilakukan sekarang adalah dengan memanfaatkan momen sertifikasi tanah untuk mengendalikan pola pengolahan lahan yang konservatif dengan melihat potensi kecocokan karakteristik lahan dengan tanaman konservatif seperti kopi maupun teh. Serikat Petani bersama *stakeholders* terkait menentukan Desa Mlandi di Kecamatan Garung sebagai *pilot project* untuk program konservasi lahan berbasis ekonomi masyarakat yaitu dengan mengubah komoditas tanaman semusim dengan kopi.

Desa Mlandi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Garung yang berbatasan dengan Desa Sembungan di Kecamatan Kejajar. Terputusnya jalur transportasi Dieng-Wonosobo di

Tieng mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Kecamatan Kejajar serta mengganggu industri pariwisata yang ada, sehingga masyarakat bersama pemerintah dan pihak lainnya melakukan upaya pembangunan jalur alternatif wonosobo-Dieng via Mlandi. Konservasi dengan tanaman kopi kedepannya diharapkan dapat menunjang Desa Mlandi sebagai kawasan agrowisata jika jalan wonosobo-Dieng via Mlandi telah rampung digarap. Selain itu juga terdapat potensi wisata alam yaitu air terjun Sikarim.

Sedangkan Bhineka Karya berkontribusi dalam kegiatan mitigasi bencana, khususnya dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis dengan upaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada lahan (*off farm*), yaitu dengan mengalihkan sumber pendapatan utama masyarakat ke sektor jasa pariwisata dan industri pengolahan tanaman konservatif seperti carica dan terong belanda. Hal yang dilakukan adalah terus melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui organisasi sosial yang ada untuk meyakinkan masyarakat tentang sektor pariwisata yang menjanjikan. Kegiatan terbaru yang dilakukan adalah menetapkan Desa Igrimranak sebagai Desa Wisata yaitu dengan membuka obyek wisata bukit Roto Dowo yang hamper sama pesonanya dengan bukit Sikunir di Sembungan yang telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata merupakan solusi paling logis untuk menghentikan budidaya tanaman kentang yang sangat merusak lingkungan. Apalagi dengan kepemilikan lahan yang semakin kecil, peluang ekonomi di sektor jasa pariwisata dapat menjadi alternatif matapencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa dengan merusak lingkungan.

Perbedaan basis kegiatan kedua komunitas tersebut didasarkan pada potensi dan keadaan biogeofisik di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung. Desa-desa di Kecamatan Kejajar sebagian besar merupakan kawasan wisata Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo, sehingga upaya pengembangan industri pariwisata atau upaya *off farm* lainnya sangat cocok untuk diterapkan dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Sedangkan Desa lainnya yang tidak mempunyai potensi wisata lebih difokuskan untuk upaya konservasi lahan berupa penanaman tanaman keras (*agroforestry*), tanaman konservasi (kopi, carica, terong belanda, dan lain-lain), dan tumpang sari dengan komoditas lain selain kentang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah melalui dukungan dari berbagai *stakeholders*

terkait termasuk pihak Swasta, LSM maupun Ngo lainnya. Pendekatan yang dilakukan melalui sistem pertanian berkelanjutan oleh Serikat petani melalui penanaman tanaman keras (*agroforestry*), tanaman konservasi (kopi, carica, terong belanda, dan lain-lain), dan tumpang sari dengan komoditas lain selain kentang. Sedangkan Bhineka Karya melalui pendekatan *off farm*, yaitu wisata (agrowisata, wisata alam, sejarah dan kebudayaan) dan geopark juga menjadi pendekatan paling logis yang diupayakan. Kedua pendekatan dilakukan atas dasar potensi dan keadaan biogeofisik yang berbeda diantara lokasi penelitian sehingga kegiatan rehabilitasi lahan kritis dapat mencapai keberhasilan. Orientasi ekonomi masyarakat menjadi penentu dari keberlanjutan program dari kedua pendekatan yang dilakukan, hingga saat ini kegiatan wisata masih kalah dengan kegiatan pertanian. Selain itu kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti pendidikan yang rendah dan rasio kepemilikan lahan yang semakin sempit juga masih menjadi penghambat keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan *off farm*, sehingga pendekatan pertanian berkelanjutan lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan *off farm*.

Penguatan modal sosial dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui kajian dalam tiga tipologi modal sosial (*Bonding social capital*, *Bridging social capital* dan *Linking social capital*) yang dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menunjukkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah melalui dukungan dari para *stakeholders* terkait telah meningkatkan kapasitas komunitas dalam mengendalikan permasalahan degradasi lahan yang semakin parah. Sehingga peran komunitas, khususnya Bhineka Karya dan Serikat Petani dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah mencerminkan praktik *disaster governance* berbasis masyarakat dalam penanggulangan bencana di kawasan Dieng Plateau Kabupaten Wonosobo.

SARAN

Dari seluruh pembahasan hasil penelitian dan simpulan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu dikaji lebih dalam lagi tentang bagaimana aplikasi konsep modal sosial dalam *disaster governance* berbasis masyarakat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih tertuju pada kawasan yang lebih kecil, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktik *disaster governance* berbasis masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Arya Maulana Wijaya. 2016. *Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah ISSN : 2503-4685 Vol. 1 No. 1 April 2016.
- Edi Indrizal dan Erwin. 2014. *Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasi dan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar)*. Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang.
- Gall, M, dkk. 2014. *Governance in Disaster Risk Management*. Integrated Research On Disaster Risk.
- Nakagawa and Shaw. 2004. Social Capital:A Missing Link to Disaster Recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, Vol. 22, No. 1, pp. 5–34.
- Totikidis V1, Armstrong A F and Francis R D. 2005. The Concept of Community Governance: A Preliminary Review. Centre for International Corporate Governance Research, Faculty of Business and Law, Victoria University, Melbourne, Australia. *Refereed paper presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.14/Menhut-Ii/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2012. Dalam <http://arsip.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2012/P.14%20Menhut%202012.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.